

## MANAJEMEN PENGEMBANGAN PARIWISATA PADA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Nahdia Aisya<sup>1</sup>, Arpandi<sup>2</sup>, Yusran Fahmi<sup>3</sup>  
Program Studi Administrasi Publik  
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai  
E-mail: [aisyanahdia3@gmail.com](mailto:aisyanahdia3@gmail.com)

### ABSTRAK

Dalam Manajemen Pengembangan Pariwisata pada Disporapar ini terdapat beberapa masalah yang di temukan, seperti Perencanaan Pengembangan Pariwisata yang memerlukan waktu cukup lama sehingga berdampak pada besarnya kebutuhan anggaran. Selain itu, kurangnya pelatihan menyebabkan sebagian pengelola wisata belum memahami pengelolaan potensi lahan secara optimal, yang berakibat pada pembagian tugas yang belum berjalan dengan baik. Keterbatasan SDM serta minimnya anggaran dan koordinasi juga menghambat pengembangan potensi wisata, sehingga pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan wisata masih tergolong rendah. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen pengembangan pariwisata pada Disporapar Kab. HSU.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian Deskriptif Kualitatif. Teknik pengambilan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi secara langsung terjun ke lapangan dengan jumlah sampel 13 orang. Dalam Teknik penarikan sampel menggunakan metode “*purposive Sampling*”. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pengembangan pariwisata pada Disporapar Kab. HSU saat ini kurang baik yang di ukur berdasarkan teori George R. Terry dalam Abd. Rohman, M. AP (2017:20) yaitu: *Pertama*, Sub Variabel Fungsi Perencanaan dengan Indikator Anggaran kurang baik, Tempat kurang baik dan Waktu cukup baik. *Kedua*, Sub Variabel Fungsi Pengorganisasian dengan Indikator Pembagian Tugas kurang baik, Pencapaian Tujuan kurang baik dan SDM kurang baik. *Ketiga*, Sub Variabel Fungsi Penggerakkan dengan Indikator Stakeholder kurang baik dan Cara Menggerakkan Waktu Pelaksanaan cukup baik. *Keempat*, Sub Variabel Fungsi Pengawasan dengan Indikator Pemantauan Terkait Memastikan Kegiatan Yang Direncanakan cukup baik dan Evaluasi Pencapaian Hasil cukup baik. Adapun faktor pendukung, yaitu: Kedisiplinan pelaksanaan dan Kearifan lokal serta promosi. Sedangkan faktor penghambat yaitu: Kurangnya Anggaran, Kurangnya Pelatihan, Belum tercapainya tujuan dan Kurangnya koordinasi dan sinergi antar pihak terkait.

Saran ditujukan kepada kepala Dinas Disporapar HSU untuk perlu mengoptimalkan pengelolaan anggaran, meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan yang berkelanjutan, serta memperkuat koordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak terkait agar pelaksanaan program tercapai. Kabid pariwisata diharapkan lebih aktif mengusulkan penambahan dana anggaran, meningkatkan pelatihan kepada pengelola wisata. Pengelola pariwisata diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan objek wisata melalui pemanfaatan potensi yang ada secara optimal, meskipun masih menghadapi keterbatasan anggaran. Selain itu, pengelola perlu aktif mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan. Masyarakat diharapkan dapat bereperan aktif dalam mendukung pengembangan pariwisata melalui upaya menjaga lingkungan dan fasilitas wisata.

**Kata Kunci:** Manajemen, Pengembangan Pariwisata, Disporapar, Kab. HSU

### ABSTRACT

*In the management of tourism development at the Youth, Sports, and Tourism Office (Disporapar), several problems were identified, including tourism development planning that requires a relatively long time, which has an impact on increasing budgetary needs. In addition, the lack of training has resulted in some tourism managers having limited understanding of optimal land potential management, leading to ineffective*

*task distribution. Limited human resources, insufficient budget allocation, and weak coordination have also hindered the development of tourism potential, causing the level of community knowledge and skills in tourism management to remain relatively low. This study aims to examine the tourism development management implemented by Disporapar of Hulu Sungai Utara Regency.*

*This research employed a qualitative approach with a descriptive qualitative design. Data were collected through interviews, observations, and documentation conducted directly in the field, involving 13 informants selected using purposive sampling. The collected data were analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification techniques.*

*The results indicate that tourism development management at Disporapar of HSU Regency is still considered inadequate, as measured using George R. Terry's management theory as cited in Abd. Rohman, M.AP (2017–2020). First, the planning function shows weaknesses in budget and location indicators, while the time indicator is relatively adequate. Second, the organizing function reveals shortcomings in task distribution, goal achievement, and human resources. Third, the actuating function demonstrates weak stakeholder involvement, although the implementation timing is considered fairly adequate. Fourth, the controlling function shows that monitoring and evaluation of planned activities and outcomes are relatively adequate. Supporting factors include implementation discipline, local wisdom, and promotion, while inhibiting factors consist of limited budget, lack of training, unachieved objectives, and insufficient coordination and synergy among related stakeholders.*

*Recommendations are addressed to the Head of Disporapar of HSU Regency to optimize budget management, enhance human resource capacity through continuous training, and strengthen coordination and synergy with relevant stakeholders to ensure effective program implementation. The Head of the Tourism Division is expected to be more proactive in proposing additional budget allocations and improving training programs for tourism managers. Tourism managers are encouraged to improve the quality of tourism object management by optimally utilizing existing potentials despite budget limitations and actively participating in available training programs. Furthermore, the community is expected to play an active role in supporting tourism development by maintaining the environment and tourism facilities.*

**Keyword:** *Management, Tourism Development, Department of Yout, Sports dan Tourism, North Hulu Sungai Utara.*

## PENDAHULUAN

Pengembangan pariwisata memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Selain berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah, sektor pariwisata juga mampu menciptakan lapangan kerja serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, berbagai daerah di setiap provinsi terus berupaya mengembangkan potensi pariwisata yang dimilikinya. Salah satu jenis pariwisata yang mengalami peningkatan minat adalah wisata budaya, baik dari wisatawan domestik maupun mancanegara. Keberagaman alam, budaya, dan warisan leluhur yang masih terjaga menjadi keunggulan pariwisata Indonesia yang perlu dilestarikan secara berkelanjutan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 menjelaskan bahwa kegiatan pariwisata tidak hanya berupa aktivitas wisata, tetapi juga melibatkan dukungan fasilitas dan pelayanan yang diselenggarakan oleh masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini, peran pemerintah daerah melalui perangkat birokrasinya menjadi sangat penting dalam mengelola dan mengembangkan sektor pariwisata agar sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah. Pengelolaan pariwisata budaya yang dilakukan pemerintah daerah diharapkan mampu mencerminkan identitas serta keunikan daerah sebagai daya tarik utama wisata.

Dalam perspektif administrasi publik, pengembangan pariwisata merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan publik yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Administrasi publik tidak hanya berfokus pada perumusan kebijakan, tetapi juga mencakup proses pengelolaan organisasi publik, penyediaan layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, manajemen pengembangan pariwisata perlu dilaksanakan secara efektif dan terencana agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Disporapar Kab. HSU sebagai instansi yang bertanggung jawab di bidang pariwisata telah melaksanakan berbagai upaya pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata. Upaya tersebut meliputi pendataan objek wisata yang tersebar di setiap kecamatan serta pengembangan destinasi wisata melalui kegiatan promosi, terutama melalui media sosial. Beberapa destinasi yang dipromosikan antara lain Pulau Sambuji di Desa Tampakang Kecamatan Paminggir dan wisata Kerbau Rawa di Desa Bararawa Kecamatan Paminggir. Selain itu, dinas terkait juga secara rutin menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti pameran, lomba, serta pergelaran seni dan budaya sebagai bentuk promosi pariwisata dan upaya meningkatkan kunjungan wisatawan.

Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki potensi pariwisata yang cukup besar dan prospektif yang berdampak pada meningkatnya kemampuan daerah dalam menghadapi persaingan antardaerah, baik secara regional maupun nasional. Berdasarkan data Disporapar, terdapat 29 objek wisata yang tersebar di sembilan kecamatan, meliputi wisata budaya, alam, air, religi, agrowisata, dan kerajinan. Potensi tersebut antara lain tersebar di Kecamatan Babirik, Banjarang, Danau Panggang, Haur Gading, Amuntai Tengah, Amuntai Selatan, Amuntai Utara, Paminggir, dan Sungai Pandan. Salah satu potensi wisata yang masih terus dikembangkan adalah wisata Kerbau Rawa di Paminggir dan Pulau Sambujur menjadi daya tarik wisata unggulan yang menyajikan aktivitas pengamatan kerbau rawa di lingkungan alamnya, disertai panorama kawasan rawa yang asri, pengalaman menyusuri rawa menggunakan perahu, serta pengenalan terhadap budaya dan kuliner khas masyarakat setempat.

Permasalahan yang dihadapi dalam manajemen pengembangan pariwisata pada Disporapar Kab. HSU meliputi :

1. Kondisi wilayah yang rawan banjir sehingga perencanaan pengembangan pariwisata membutuhkan waktu yang relatif lama dan berdampak pada peningkatan kebutuhan anggaran. (Sumber : Data Lokasi dan Jenis Kerusakan Pariwisata di Kabupaten Hulu Sungai Utara 2025)
2. Terbatasnya pelatihan bagi pengelola wisata yang menyebabkan belum optimalnya pemahaman dalam pengelolaan potensi lahan dan pembagian tugas pengelolaan. (Sumber: Data Susunan Pengurus Pokdarwis Kabupaten Hulu Sungai Utara 2025)
3. Keterbatasan sumber daya manusia yang berpengaruh terhadap belum maksimalnya pengembangan potensi pariwisata daerah. (Sumber: Data Aparat Sipil Negara PNS & PPPK Disporapar Kabupaten Hulu Sungai Utara 2025)

## METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif yang diarahkan untuk menggambarkan secara mendalam berbagai kondisi serta fenomena yang berkaitan dengan objek penelitian berdasarkan keadaan nyata di lapangan. Data penelitian dikumpulkan melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi agar diperoleh informasi yang menyeluruh dan sesuai dengan fokus kajian. Penetapan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yakni pemilihan narasumber yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga diperoleh sebanyak 13 informan sebagai sumber data utama (Sugiyono, 2015).

Analisis penelitian ini menggunakan teori manajemen George R. Terry sebagaimana dikemukakan dalam Abd. Rohman, M.AP (2017:20), yang meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan. Fungsi perencanaan mencakup aspek anggaran, tempat, dan waktu; fungsi pengorganisasian meliputi pembagian tugas, pencapaian tujuan, serta ketersediaan sumber daya manusia; fungsi penggerakkan berkaitan dengan keterlibatan pemangku kepentingan dan mekanisme pelaksanaan kegiatan; sedangkan fungsi pengawasan meliputi kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah direncanakan.

Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin kredibilitas data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik, antara lain perpanjangan waktu pengamatan, peningkatan ketekunan peneliti, triangulasi, analisis kasus negatif, penggunaan bahan referensi, serta pelaksanaan member check (Sugiyono, 2015).

## PEMBAHASAN

### A. Manajemen Pengembangan Pariwisata pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pembahasan mengenai manajemen pada penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan batasan yang jelas terhadap ruang lingkup permasalahan yang dikaji, sehingga analisis yang dilakukan tetap terarah dan tidak menyimpang dari fokus penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori manajemen George R. Terry sebagaimana dikemukakan dalam Abd. Rohman, M.AP (2017:20) sebagai landasan analisis dalam mengkaji manajemen pengembangan pariwisata pada Disporapar Kab. HSU. Adapun fungsi manajemen yang dianalisis yang melibatkan tahapan perencanaan, pengaturan organisasi, pelaksanaan kegiatan, serta pengendalian.

#### 1. Fungsi Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan tahapan awal dalam proses manajemen yang berkaitan dengan penetapan tujuan serta penentuan serangkaian tindakan yang disusun sebagai sarana pencapaian tujuan. Dalam konteks pengembangan pariwisata, perencanaan menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan, program, serta penggunaan sumber daya yang tersedia. Perencanaan yang disusun secara sistematis dan matang akan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan serta pencapaian hasil yang diharapkan. Sebaliknya, perencanaan yang kurang optimal berpotensi menyebabkan pelaksanaan program tidak berjalan sesuai tujuan dan hasil yang diperoleh menjadi kurang maksimal.

##### a. Anggaran

Anggaran memiliki kedudukan penting sebagai bagian dari manajemen pengembangan pariwisata karena berfungsi sebagai dasar dalam pengalokasian sumber daya keuangan guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Ketersediaan anggaran yang memadai akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program pengembangan pariwisata.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, pengelolaan anggaran dalam manajemen pengembangan pariwisata pada Disporapar Kab. HSU optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan alokasi dana yang tersedia, sehingga beberapa program pengembangan pariwisata belum dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

**b. Tempat**

Aspek tempat dalam manajemen pengembangan pariwisata berkaitan dengan penentuan lokasi objek wisata serta kesiapan sarana dan prasarana pendukung yang menunjang aktivitas kepariwisataan. Pemilihan lokasi yang strategis dan didukung aksesibilitas yang memadai akan mempengaruhi minat kunjungan wisatawan.

Berdasarkan temuan hasil wawancara, pengamatan lapangan dan telah dokumentasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa aspek lokasi atau tempat dalam manajemen pengembangan pariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara masih belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh letak beberapa objek wisata yang berada jauh dari pusat kota serta kondisi akses jalan yang belum memadai, sehingga menyulitkan wisatawan untuk menjangkau lokasi wisata tersebut.

**c. Waktu**

Aspek waktu dalam manajemen pengembangan pariwisata berkaitan dengan penetapan tahapan pelaksanaan kegiatan serta penentuan target pencapaian program, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Perencanaan waktu yang jelas berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar program dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, perencanaan waktu pelaksanaan kegiatan pariwisata pada Disporapar Kab. HSU telah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan dengan jadwal yang telah direncanakan serta pertimbangan terhadap kondisi lapangan, sehingga sebagian besar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

**2. Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*)**

Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi manajemen yang berhubungan dengan pengaturan peran, pembagian tugas, serta pengoordinasian berbagai sumber daya yang tersedia dalam organisasi guna mendukung pencapaian tujuan. Dalam konteks pengembangan pariwisata, fungsi pengorganisasian berperan penting dalam memastikan bahwa setiap unsur organisasi dapat bekerja secara terarah dan saling mendukung dalam pelaksanaan program.

**a. Pembagian Tugas**

Pembagian tugas dalam pengembangan pariwisata bertujuan untuk membagi pekerjaan ke dalam unit-unit yang lebih spesifik agar kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai hasil yang maksimal dengan penggunaan sumber daya yang tepat. Pembagian tugas yang jelas akan membantu setiap pelaksana memahami peran dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan objek wisata.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pembagian tugas dalam manajemen pengembangan pariwisata pada Disporapar Kab. HSU masih belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pelatihan pengelolaan objek wisata yang diterima oleh pengelola maupun pegawai, sehingga sebagian pelaksana belum sepenuhnya memahami tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Kondisi tersebut berdampak pada pelaksanaan kegiatan pengembangan pariwisata yang belum berjalan secara maksimal.

**b. Pencapaian Tujuan**

Pencapaian tujuan dalam fungsi pengorganisasian berkaitan dengan upaya mengarahkan seluruh kegiatan dan sumber daya organisasi agar selaras dengan tujuan pengembangan pariwisata yang telah ditetapkan. Kejelasan tujuan menjadi pedoman bagi setiap unit kerja dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pencapaian tujuan dalam manajemen pengembangan pariwisata pada Disporapar Kab. HSU masih belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya partisipasi dan dukungan masyarakat serta keterbatasan perbaikan fasilitas pendukung pariwisata, sehingga tujuan pengembangan pariwisata belum dapat tercapai secara menyeluruh dan berkelanjutan.

**c. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan unsur utama dalam pelaksanaan fungsi pengorganisasian karena berperan langsung dalam menjalankan seluruh program dan kegiatan pengembangan pariwisata. Ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia akan menentukan efektivitas pelaksanaan tugas yang telah diorganisasikan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, kondisi sumber daya manusia pada Disporapar Kab. HSU masih belum memadai. Jumlah tenaga kerja yang terbatas serta pembagian tugas yang belum sepenuhnya efektif menyebabkan pelaksanaan pengembangan pariwisata belum berjalan secara maksimal.

**3. Fungsi Penggerakkan (*Actuating*)**

Fungsi penggerakkan merupakan tahapan manajemen yang berkaitan dengan pelaksanaan rencana yang telah disusun agar dapat diimplementasikan secara nyata. Fungsi ini menekankan pada upaya mengarahkan, memotivasi, serta mengoordinasikan tenaga kerja atau sumber daya manusia organisasi yang berperan dalam pencapaian tujuan. Dalam pengembangan pariwisata, fungsi penggerakkan menjadi penting karena berhubungan langsung dengan pelaksanaan program di lapangan.

**a. Stakeholder**

Pihak-pihak yang berkepentingan atau dikenal sebagai stakeholder memiliki peran serta keterlibatan dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata, baik dari unsur pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha. Keterlibatan stakeholder diperlukan untuk memperoleh dukungan, sumber daya, serta kerja sama yang berkelanjutan dalam pelaksanaan program pengembangan pariwisata.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan, keterlibatan stakeholder dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata di Kab. HSU masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pemahaman stakeholder terkait pengembangan objek wisata yang dipengaruhi oleh minimnya pelatihan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif berupa sosialisasi, pembinaan, serta penguatan peran pokdarwis dan pelaku ekonomi kreatif agar tercipta sinergi antar stakeholder yang lebih efektif dan berkelanjutan.

**b. Cara Menggerakkan Waktu Pelaksanaan**

Aspek pengelolaan waktu dalam fungsi penggerakkan berkaitan dengan upaya mengatur dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pengelolaan waktu yang baik mencakup penyusunan jadwal yang realistis, pemantauan pelaksanaan kegiatan, serta penyesuaian apabila terjadi kendala di

lapangan. Hal ini juga melibatkan pendelegasian tugas dan koordinasi antar pihak terkait agar program dapat berjalan secara efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, cara menggerakkan waktu pelaksanaan kegiatan pariwisata pada Disporapar Kab. HSU telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari pelaksanaan program dan kegiatan pariwisata yang umumnya telah disesuaikan dengan jadwal tahunan yang telah direncanakan.

#### 4. Fungsi Pengawasan (*Controlling*)

Fungsi pengawasan merupakan bagian dari proses manajemen yang bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan melalui kegiatan pengukuran kinerja, pemantauan pelaksanaan program, serta evaluasi hasil sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian dalam pengembangan pariwisata

##### a. Pemantauan terkait memastikan kegiatan yang di rencanakan

Pemantauan pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program dan aktivitas pengembangan pariwisata berjalan sesuai dengan rencana dan prosedur yang telah ditetapkan. Melalui pemantauan, potensi penyimpangan, kelalaian, maupun kendala dalam pelaksanaan kegiatan dapat diketahui sejak dini sehingga dapat segera dilakukan tindakan perbaikan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, kegiatan pemantauan pelaksanaan pengembangan pariwisata pada Disporapar Kab. HSU telah berjalan dengan cukup baik, namun belum dilaksanakan secara merata pada seluruh objek wisata. Beberapa objek wisata telah memperoleh pemantauan secara rutin, sementara sebagian lainnya masih belum mendapatkan pengawasan yang optimal.

##### b. Evaluasi Pencapaian Hasil

Evaluasi pencapaian hasil merupakan proses penilaian terhadap kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan target atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi ini diarahkan untuk menelaah capaian program dan penggunaan sumber daya, serta mengungkap aspek- aspek yang perlu diperbaiki masih ada, serta menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan kebijakan dan program pengembangan pariwisata ke depan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pelaksanaan evaluasi pencapaian hasil pada Disporapar Kab. HSU telah dilakukan dengan cukup baik, namun belum sepenuhnya menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam pemerataan pelaksanaan evaluasi serta tindak lanjut atas hasil evaluasi agar pengembangan pariwisata dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

#### B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pengembangan Pariwisata pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara

Faktor-faktor yang mempengaruhi Manajemen Pengembangan Pariwisata pada Disporapar Kab. HSU terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat yang dapat diuraikan sebagai berikut:

##### 1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam Manajemen Pengembangan Pariwisata pada Disporapar memberikan dampak positif dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

### **a. Kedisiplinan Pelaksanaan**

Kedisiplinan pelaksanaan merupakan bentuk kepatuhan dalam menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan aturan, prosedur, serta jadwal yang telah ditetapkan. Kedisiplinan ini berkaitan dengan konsistensi pelaksanaan tugas secara tertib dan tepat waktu agar tujuan kegiatan dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, kedisiplinan waktu pelaksanaan kegiatan pariwisata pada Disporapar Kab. HSU telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pertimbangan terhadap faktor cuaca dan kondisi lingkungan dalam pelaksanaan kegiatan. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan dalam penyusunan jadwal yang lebih terstruktur serta penguatan koordinasi antar pengelola agar seluruh kegiatan dapat dilaksanakan secara lebih tepat waktu dan terencana.

### **b. Kearifan Lokal dan Promosi**

Kearifan lokal merupakan nilai-nilai, tradisi, dan budaya yang berkembang di masyarakat serta menjadi identitas khas suatu daerah. Dalam pengembangan pariwisata, kearifan lokal memiliki peran penting sebagai daya tarik yang membedakan suatu destinasi dari daerah lainnya. Sementara itu, promosi pariwisata berfungsi untuk menyebarkan informasi mengenai potensi dan keunikan daerah kepada masyarakat luas.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, kearifan lokal dan kegiatan promosi saling mendukung dalam meningkatkan daya tarik pariwisata di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pemanfaatan unsur budaya lokal dalam kegiatan promosi mampu memperkuat citra destinasi wisata sekaligus menarik minat kunjungan wisatawan.

## **2. Faktor Penghambat**

Faktor penghambat dalam manajemen pengembangan pariwisata merupakan berbagai kondisi yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh Disporapar Kab. HSU.

### **a. Kurangnya anggaran**

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam pelaksanaan manajemen pengembangan pariwisata di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Anggaran memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program, mulai dari perencanaan, pengembangan sarana dan prasarana, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tanpa dukungan pendanaan yang memadai, pelaksanaan program pengembangan pariwisata sulit direalisasikan secara optimal, meskipun tersedia sumber daya manusia yang kompeten.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa kondisi anggaran dalam manajemen pengembangan pariwisata pada Disporapar Kab. HSU masih tergolong kurang baik. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dana yang tersedia untuk mendukung seluruh program pengembangan pariwisata, sehingga beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

### **b. Kurangnya pelatihan**

Kurangnya pelatihan dalam pengelolaan pariwisata merupakan kondisi di mana sumber daya manusia yang terlibat belum memperoleh pembekalan pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Pelatihan yang dimaksud meliputi manajemen destinasi wisata, pelayanan kepada pengunjung, pengelolaan fasilitas, serta pemahaman mengenai kebersihan, keamanan, dan pelestarian lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa minimnya pelatihan bagi pengelola wisata menyebabkan pengelolaan objek wisata belum berjalan secara optimal. Kondisi ini berdampak pada kualitas pelayanan dan kenyamanan pengunjung, sehingga turut menghambat perkembangan objek wisata di Kab. HSU.

**c. Belum Tercapainya Tujuan**

Belum tercapainya tujuan dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata pada Disporapar Kab. HSU menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan belum sepenuhnya mampu mengarahkan seluruh aktivitas organisasi secara efektif menuju tujuan yang telah ditetapkan. Kondisi ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang belum berjalan secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa belum tercapainya tujuan pengelolaan dan pengembangan pariwisata di Kab. HSU disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pelatihan bagi sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antara pelaksana program dengan masyarakat, serta belum optimalnya pengelolaan dan perbaikan fasilitas wisata.

**d. Kurangnya koordinasi dan sinergi antar pihak terkait**

Kurangnya koordinasi dan sinergi antar pihak terkait merupakan kondisi di mana kerja sama, komunikasi, dan keterpaduan peran antara instansi terkait, pemerintah desa, pengelola wisata, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya belum berjalan secara optimal. Akibatnya, pelaksanaan program pengembangan pariwisata tidak terintegrasi dengan baik, yang ditandai dengan ketidaktepatan pembagian tugas, tumpang tindih kewenangan, serta rendahnya efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa koordinasi dan sinergi antar pihak terkait dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih tergolong kurang baik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak serta terbatasnya keterlibatan stakeholder, sehingga pelaksanaan kegiatan pariwisata belum berjalan secara efektif dan optimal.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Manajemen Pengembangan Pariwisata pada Disporapar Kab. HSU dikatakan kurang baik. Berikut kesimpulan yang telah dirangkum penulis, yaitu :

1. Manajemen Pengembangan Pariwisata pada Disporapar Kab. HSU dikatakan kurang baik. Dapat dilihat dari ; a. Fungsi Perencanaan, Pertama, anggaran, menunjukkan bahwa dana yang tersedia belum mencukupi kebutuhan pengembangan pariwisata karena proses pembangunan objek wisata memerlukan waktu yang cukup lama sehingga penggunaan dana menjadi lebih besar. Kedua, tempat, menunjukkan bahwa sebagian lokasi objek wisata berada jauh dari pusat kota, rawan banjir, serta memiliki akses yang terbatas sehingga memerlukan transportasi khusus untuk mencapainya. Ketiga, waktu, pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal perencanaan yang ditetapkan, sehingga dapat dikatakan cukup baik. b. Fungsi Pengorganisasian, Pertama pembagian tugas dalam pengembangan pariwisata belum berjalan optimal karena masih terdapat beberapa pegawai yang kurang memahami tugas dan tanggung jawabnya. Kedua, pencapaian tujuan dalam pengembangan pariwisata belum berjalan optimal karena masih rendahnya dukungan masyarakat sekitar terhadap kegiatan pengelolaan dan pengembangan

wisata. Ketiga, sumber daya manusia di bidang pariwisata masih terbatas, terutama dari segi jumlah tenaga dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. c. Fungsi penggerakkan, Pertama stakeholder yaitu kelompok sadar wisata (pokdarwis) belum berjalan optimal, karena keterbatasan pengetahuan dan pelatihan. Kedua, cara menggerakkan waktu pelaksanaan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahunan yang ditetapkan. d. Fungsi Pengawasan, Pertama, pemantauan terkait memastikan kegiatan yang direncanakan pengembangan pariwisata telah dilakukan secara rutin untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan sehingga dapat dikatakan cukup baik. Kedua, Evaluasi pencapaian hasil dilakukan setiap akhir tahun untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan program dengan target yang telah ditetapkan sehingga dapat dikatakan cukup baik.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Manajemen Pengembangan Pariwisata pada Disporapar Kab. HSU ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :
  - a. Faktor Pendukung
    - 1) Kedisiplinan Pelaksanaan
    - 2) Kearifan lokal dan promosi
  - b. Faktor Penghambat
    - 1) Kurangnya Anggaran
    - 2) Kurangnya Pelatihan
    - 3) Belum Tercapainya Tujuan
    - 4) Kurangnya Koordinasi dan Sinergi Antar Pihak Terkait

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara
- George. R. Terry. 2017. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Original Segel Penerbit
- Dwiyanto, Agus 2018, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta  
<http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/01/pengertian-manajemen-secara-umum-adalah.html>  
(Diakses pada 06 Oktober 2025)
- <http://pariwisataindonesia2015.blogspot.com/2015/11/konsep-pengembangan-pariwisata.html>  
(Diakses pada 06 Oktober 2025)
- Keban, Yermias T, 2018, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*, Gava Media. Yogyakarta
- Kumorotomo, Abu Wahyudi, 2015. *Etika Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Pasalong, Harbani. 2018. *Teori Administrasi Publik Alfabeta*. Bandung
- Ramdhan, M. 2021. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN) NICEF. (2020).
- Violence against Children. New York: United Nations Children's Fund.
- STIA, Tim Penyusun, 2022. In *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Sarjana Strata (S1)*, by Tim Penyusun STIA. Amuntai: STIA.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung.



Wijaya, U.H. 2020.*Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray)